

DAFTAR PUSTAKA

- 5 *Kelebihan serta Implementasi Nasional e-Bupot 23_26*. (2020). <https://ebupotlearning.com/5-kelebihan-serta-implementasi-nasional-e-bupot-23-26/>
- Adriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Salemba Empat.
- Albari. (2009). Pengaruh kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Siasat Bisnis*, 13, 1–13.
- Arlitayani, N. K. M. (2020). Ini Manfaat e-Bupot PPh Pasal 23/26, Tunggu Apa Lagi ? In *Pajak.Go.Id*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/ini-manfaat-e-bupot-pph-pasal-2326-tunggu-apa-lagi>
- Boediono. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. PT Rineka Cipta.
- Dhaniswara, A. S. (2020). *30 Menit Paham e-Bupot*. KPP Madya Jakarta Selatan I.
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2021). *Narahubung Media: Peran Pajak Sebagai Stimulus Ekonomi di Masa Pandemi*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017a). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP_178/PJ/2017 tentang Penetapan Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017*. S.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017b). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26*. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020a). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP_269/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017*. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020b). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP_368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017*. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
- Eka, I. W. A. (2019). the Impact of the Indonesian Tax Administration Reform on

- Tax Compliance and Tax Revenue. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(1), 1–24. <https://doi.org/10.14203/jep.27.1.2019.1-24>
- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Andi.
- Karaawy, N. A. A. Al. (2018). The Impact of Making Tax Digital Application on the Accounting Cost. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(3).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018a). Menkeu: Pajak Merupakan Tulang Punggung Nasional. In www.kemenkeu.go.id (p. Berita). <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pajak-merupakan-tulang-punggung-nasional/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018b). *Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Sekretariat Negara.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Menkeu : Pendapatan Negara Semester I Tahun 2021 Tumbuh 9,1 Persen*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pendapatan-negara-semester-i-tahun-2021-tumbuh-9-1-persen/>
- Kotler, P. (2008). *Manajemen Pemasaran Edisi 12 Jilid 2*. Indeks.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Terb). Andi.
- Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Sekretariat Negara.
- Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*. Sekretariat Negara.
- Nurillah, S. A., & Susilawati, N. (2018). Compliance Cost Analysis in Post Implementation of Electronic Withholding Tax Slip (Study on E-Bupot Phase I User Taxpayers). *2nd International Conference on Administrative Science, Policy, and Governance Studies 2018 (ICAS-PGS 2018)*, 268–276. <https://drive.google.com/file/d/1tkEc1tRKuhFVFiU73F-oB-eeEMuZdZFj/view>
- Purnamasari, D. I., Dps, R. H., Nasional, P., Veteran, ", & Yogyakarta, ". (2018). The Effect of Modernization of Indonesia's Tax Administration System on Tax Compliance: A Study of Small Medium Enterprises (SMEs) Taxpayers. *International Journal of Computer Networks and Communications Security*, 6(3), 61–65. www.ijcnscs.org

- Purwanto. (2014). *Modul Akuntansi Perpajakan*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Redaksi DDTCNews. (2021). *Rasio Kepatuhan Laporan SPT WP Badan dan OP Nonkaryawan Turun Tahun Lalu*. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-lapor-spt-wp-badan-dan-op-nonkaryawan-turun-tahun-lalu-33867>
- Sejati, A. R. T. (2019). *Menuju Administrasi Pajak Digital | Direktorat Jenderal Pajak*. <https://pajak.go.id/id/artikel/menuju-administrasi-pajak-digital>
- Setiawan, B., & Fitriandi, P. (2016). *Kupas Tuntas PPh Potput*. Salemba Empat.
- Setyowidodo, M., & Fidiana, F. (2021). Pengaruh sistem elektronik pendaftaran , pelaporan , pembayaran, dan pemotongan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(5), 1–18.
- Sirait, A. M. I. (2021). *KTТА : Tinjauan atas Penerapan Aplikasi e-Bupot Pajak Penghasilan Pasal 23/26 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah pada Tahun 2020*.
- Sitorus, R. R. (2020). Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business Studies*, 5(2), 1–16.
- Soekanto, S. (2000). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmaningtyas, P. D. (2021). *KTТА : Tinjauan atas Penerapan e-Bupot Pajak Penghasilan Pasal 23/26 di KPP Madya Denpasar*.
- Tambun, S., & Fadzy, M. (2019). Pengaruh E-Faktur Host To Host Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh Pengawasan Internal. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 1–10.
- Tarigan, W. E. (2018). *KTТА: Tinjauan Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh KPP Pratama Pondok Aren Tahun 2016*.
- Winarto, Y. (2021). *Ini 4 periode reformasi perpajakan di Indonesia menurut Sri Mulyani*. Kontan.Co.Id. <https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-4-periode-reformasi-perpajakan-di-indonesia-menurut-sri-mulyani?page=all>